

Problem dan Praktik Pengelolaan Pendidikan Tinggi Indonesia

Y. Tri Subagya

Pendidikan selalu aktual dibicarakan karena kompleksitas persoalannya yang terus menerus muncul seiring dinamika masyarakat. Kompleksitas itu bersinggungan dengan gagasan dan praktiknya. Dalam situasi saat ini, pengaruh neoliberalisme dan globalisasi tampak begitu kuat mempengaruhi gagasan sistem pendidikan dan praktiknya. Hal ini dapat dilihat dari reformasi kebijakan pendidikan yang tidak berpijak dari semangat reformasi tetapi terpelanting mengikuti ideologi dan pengaruh pasar. Dalam prakteknya, pengaruh tersebut ditanamkan oleh dua lembaga keuangan internasional yang memberikan bantuan terhadap penanganan infrastruktur pendidikan. Hasilnya pelaksanaan pendidikan di Indonesia menjadi tunduk kepada pasar dan disibukkan oleh perkara manajerial dengan mekanisme pelaporan yang detail tetapi tidak membuka ruang perbaikan. Dengan demikian, keliru anggapan bahwa pendidikan kita telah mengalami reformasi sejalan dengan tumbangannya rezim otoritarian karena perubahan yang berlangsung sudah didefinisikan terlebih dahulu oleh lembaga-lembaga internasional yang memiliki kepentingan besar dengan negeri ini.

Jurnal Retorik edisi kali ini menyajikan enam tulisan yang menyoroti praktik pendidikan dari berbagai dimensi. Beberapa artikel meninjau dari dimensi hukum dan kebijakan, manajemen serta praktek pengajarannya. Sunardi mengurai problem manajerial pendidikan. Menurut Sunardi, tata kelola pendidikan baru ini tidak hanya rumit tetapi juga menjadi semakin menyedot banyak tenaga. Hasilnya adalah melimpahnya laporan-laporan, sementara proses pendidikannya sendiri menjadi kurang memperoleh perhatian. Dalam artikelnya, dia membahas tiga hal meliputi asal-usul tata kelola atau manajerialisme baru di Indonesia, implikasi manajerialisme

baru bagi kehidupan akademis di perguruan tinggi, dan beberapa sikap dalam menghadapi otoritarianisme manajerial ini. Menurutnya, hasil dari tata kelola baru pendidikan ini adalah homogenisasi berfikir, beban kerja yang meningkat, dan biaya pendidikan yang tinggi. Homogenisasi berfikir muncul karena bahasa manajerial, beban kerja muncul karena tuntutan audit yang berlebihan, dan biaya tinggi muncul karena dibutuhkan banyak uang untuk membiayai tata kelola. Rezim manajerial ini telah mengganggu proses pendidikan karena hanya membuat mereka yang berada dalam sistem pendidikan cenderung menjadi sibuk oleh laporan, tetapi tidak mampu menjalankan proses pendidikan secara lebih baik.

Problem pendidikan yang mengabdikan pada ideologi pasar dan kepentingan pemodal juga ditekankan dalam artikel Augustinus Supratiknya. Dalam situasi itu, dia menunjukkan pentingnya pedagogi kritis dan perguruan tinggi. Berangkat dari pengamatannya antara aktivitas dan produk hukum pendidikan dengan perkembangan ekonomi politik di aras global, dia melihat benang merah yang menghubungkannya. Sama dengan pendapat Sunardi, reformasi pendidikan telah dibajak oleh pengusung gagasan neoliberalisme yang difasilitasi oleh Bank Dunia, IMF (*International Monetary Fund*) dan WTO (*World Trade Organization*). Ditengarai sasarannya adalah tetap menjaga ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju, terutama memuluskan langkah negara-negara maju menjadikan negara berkembang pasar yang menggiurkan bagi bisnis pendidikan tinggi mereka. Ancaman yang nyata dari penerapan ideologi neoliberalisme dan manajerialisme baru adalah masuknya aneka rejim regulasi yang bertujuan menyetir, dan mengontrol kehidupan pendidikan tinggi dengan cara-cara yang lebih mengutamakan nilai ekonomis pendidikan tinggi, dan menggusur narasi budaya akademik yang mengutamakan kebebasan akademik, kemerdekaan berpikir dan berekspresi, anti ortodoksi dan eksplorasi terhadap cakrawala pengetahuan baru. Dalam menghadapi neoliberalisme di pendidikan tinggi, Supratiknya meyakini pedagogi kritis sebagai jalan untuk mengatasi dampak negatifnya. Pedagogi kritis ini merupakan praktik atau tindakan etis dan politis yang memerdekakan dengan menekankan pada penguatan lulusannya untuk mengambil peran dan tanggung jawab dalam memperjuangkan semakin terbukanya ruang dan kemungkinan bagi terciptanya otonomi atau kemerdekaan, pemikiran kritis, dan kehidupan bersama yang semakin demokratis.

Tidak berjalannya reformasi pendidikan juga terlihat dari hasil penelitian Kartika Pratiwi. Dalam penelitiannya, dia menemukan bahwa kurikulum pendidikan sejarah ternyata masih berlangsung dengan menggunakan

pijakan lama walau pun kebenaran dan fakta-fakta yang justru memanipulasi sejarah untuk pelanggaran kekuasaan otoriter sudah tersingkap secara gamblang. Tidak bergemengnya kurikulum itu tampak ketika menyangkut pelajaran dan pembahasan sejarah tragedi 65. Tidak semua sekolah bisa bersikap demokratis untuk membahas kembali wacana 65 karena mereka hanya mengacu pada satu buku tertentu yang tidak berbeda dengan buku terbitan masa Orde Baru. Sementara itu, kebanyakan para guru tidak berani mengambil resiko untuk memberi wacana alternatif tentang Tragedi Kemanusiaan 1965 seperti yang digariskan dalam kebijakan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelajaran sejarah masih dikendalikan oleh lembaga resmi pemerintahan sehingga masih ada ketakutan bagi guru sejarah untuk mengajarkan fakta-fakta baru di luar cerita sejarah versi pemerintah.

Sementara itu dengan topik yang berlainan, Beny Setyawan mengajak kita memahami tentang pendidikan Seminari Menengah yang merupakan pendidikan dasar bagi calon-calon imam Katolik. Berbeda dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas lainnya, pendidikan di Seminari dijalankan secara terintegrasi melalui bidang akademik, pengalaman pastoral, dan pembinaan di bidang rohani. Beny lebih jauh memandang bahwa pendidikan di Seminari dilakukan dengan mendisiplinkan tubuh untuk membentuk mental yang taat. Hal itu dijalankan dengan memberi prasyarat para siswanya untuk tinggal di asrama. Di dalam asrama itu, mereka didisiplinkan dengan jadwal aktivitas yang ketat, membuat catatan mengenai diri dan segala aktivitasnya secara detail serta terus menerus diawasi dengan menerapkan silih bagi pelanggarnya. Melalui pendidikan dan latihan pendisiplinan tubuh, para seminaris diharapkan bisa menjadi pribadi yang bermental tangguh, mandiri dan mampu beradaptasi di dalam relasi sosial dan komunitas. Secara teoretis, Beny berargumentasi bahwa pendidikan di Seminari bisa dijelaskan dengan teori pendisiplinan tubuh dan ketaatan yang diuraikan oleh Michel Foucault.

William Batlayeri mencoba membedah pemikiran Drijarkara tentang pendidikan dengan bantuan Jacques Lacan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi Drijarkara yang sedang berwacana. Konsep dasar pendidikan Drijarkara adalah memanusiaakan manusia muda. Pemanusiaan manusia muda dibangun dari keprihatinan terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa itu. Kesatuan masyarakat, keluarga dan negara dihancurkan oleh dominasi kekuasaan asing (Hindia Belanda). Feodalisasi menjadi sarana pemakluman kekuasaan asing yang kemudian mendapatkan pengakuan publik sebagai penguasa baru. Sebagai langkah antisipatif, penyiapan tenaga pendidik melalui jalur pendidikan formal

menjadi alternatif dalam meretas persoalan. Dalam hal ini pendidikan dilihat sebagai proses pemberdayaan terhadap anak didiknya. Titik kekritisannya Drijarkara adalah melawan kekuasaan negara yang menekan otonomi dan independensi dalam pengelolaan pendidikan, termasuk sistem pendidikan guru di Indonesia.

Pada bagian akhir Budi Subanar menyajikan tinjauan kajian akademik atas trauma akibat konflik dan kekerasan yang menjadi materi pelajaran di Program Pasca sarjana Universitas Sanata Dharma. Materi itu menjadi penting berkenaan dengan eskalasi kekerasan di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia yang meninggalkan trauma dan ketidakadilan beberapa dekade belakangan ini pasca Perang Dingin. Ada tiga mata kuliah yang pernah ditawarkan di program tersebut di atas. Ketiganya adalah "Teologi Rekonsiliasi Sosial", "Memori dan Politik Ingatan" dan "Estetika dari Wilayah Konflik". Melalui kegiatan akademik, para mahasiswa diajak untuk meneliti dan menguji jejak-jejak konflik dan kekerasan yang tersimpan di dalam karya seni maupun budaya populer. Beberapa hasil kajian yang dilakukan mahasiswa telah terbit menjadi buku yang memicu perbincangan lebih luas untuk memberi perspektif maupun memperkaya data-data bagi penyelesaian problem kekerasan kolektif di masa lalu agar tidak terulang kembali.